



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENJA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah adalah dokumen yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan baik di bidang administratif dan fasilitatif maupun teknis. Didalam dokumen Renja ini terdapat tujuan dan sasaran yang diemban Kantor Wilayah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ada di dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Renja Kantor Wilayah juga berisikan program-program dan kegiatan yang menjadi core bussines Kantor Wilayah baik sebagai satuan kerja maupun sebagai koordinator Unit Pelaksana Teknis dalam menjalankan tugasnya. Program dan kegiatan Kantor Wilayah merupakan cerminan dari cita-cita Kementerian dalam mewujudkan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan berisi harapan atas keinginan organisasi yang akan datang.

Dengan telah tersusunnya Renja Kantor Wilayah ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang telah memberikan arahan dan masukan serta kontribusi dalam penyusunannya. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah T.A. 2024 yang telah bekerjasama dan bekerja keras dari awal hingga finalisasi dokumen.



Disadari bahwa meskipun telah dilakukan dengan sebaik mungkin, namun masih dijumpai adanya kekurangan, oleh karena itu sebagai Kepala Kantor Wilayah sekaligus Penanggung Jawab penyusunan dokumen ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kantor Wilayah ke depan agar dapat lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna.

Yogyakarta, 8 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Sistematika Penyusunan	1
D. Dasar Hukum	2
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI	3
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
B. Struktur Organisasi	3
C. Sumber Daya Manusia	5
D. Kondisi Saat Ini	6
E. Kondisi Yang Diharapkan	7
BAB III. RENCANA KERJA	8
A. Rencana Kinerja	8
B. Rencana Anggaran	10
C. Rencana Penarikan Dana (<i>Disbursement Plan</i>) dan Kalender Kerja	11
BAB IV. PENUTUP	12
Lampiran	
✚ RKA Satker Bagian A	
✚ Rincian Kertas Kerja Satker	
✚ Disbursement Plan / Rencana Penarikan Dana	
✚ Kalender Kerja	
✚ Perjanjian Kinerja	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. Sebagai penjabaran dari RPJM, RKP memuat rencana dan prioritas program yang lebih rinci tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) yang didalamnya memuat sasaran, target, indikator kinerja kegiatan, dan pendanaan tahun berjalan.

Renja K/L tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai wujud penjabaran tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Renja merupakan suatu upaya menjaga kesinambungan program dan kegiatan secara sistematis dan responsif terhadap kondisi dan situasi. Penyusunan Renja K/L TA 2024 memperhatikan sasaran dan program Prioritas Nasional tahun 2024. Adapun tema yang diusung dalam pembangunan RKP tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam penyusunan Renja TA 2024 terus melakukan penyempurnaan rumusan informasi kinerja sesuai pedoman penerapan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP).

Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah, pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah. Selain berperan untuk mendorong pencapaian visi misi Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, Renja Kantor Wilayah juga dapat menggambarkan peran aktif dan posisi strategis Kantor Wilayah sebagai penggerak dan *role model* bagi satuan kerja dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja T.A. 2024 dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinkronkan dokumen perencanaan dan penganggaran khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan target dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Unit Pusat. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya anggaran Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta yang fokus dan tepat sasaran dan fleksibel, serta penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan informasi pada dokumen anggaran, akuntabel dan transparan.

Adapun tujuan disusunnya Renja agar perencanaan penganggaran sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai alat bantu untuk melakukan pengecekan dan validasi terhadap data dan informasi perencanaan penganggaran satuan kerja Kantor Wilayah, dan sebagai referensi untuk melakukan penyusunan RKA-K/L tahun selanjutnya, serta untuk penilaian kinerja oleh para Stake Holders.

C. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta T.A. 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Sistematika Penyusunan
- d. Dasar Hukum

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

- a. Struktur Organisasi
- b. Tugas Pokok dan Fungsi
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Kondisi Saat Ini
- e. Kondisi Yang Diharapkan

BAB III. RENCANA KERJA

- a. Rencana Kinerja
- b. Rencana Anggaran
- c. Rencana Penarikan Dana (*Disbursement Plan*)
- d. Kalender Kerja

BAB IV. PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta T.A. 2024 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Wilayah menjadi supporting utama penggerak terwujudnya visi dan misi Kementerian melalui layanan manajemen internal, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan anggaran yang akuntabel, sistem perencanaan yang SMART, manajemen kepegawaian yang profesional dan terpercaya, penyediaan informasi yang cepat, akurat, terkini, dan transparan melalui fungsi kehumasan, tata kelola keorganisasian, pemberian layanan hukum dan ham yang prima di bidang masyarakat, keimigrasian, administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitator peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dan layanan hak asasi manusia. Seluruh fungsi tersebut dijalankan oleh Kantor Wilayah untuk menciptakan sistem kinerja Kementerian yang lebih PASTI dan berAKHLAK.

Untuk menginternalisasikan tugas dan fungsi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah, telah dibuat acuan kerja yang jelas, terarah dan terukur dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja). Disisi lain, Renja dibuat untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada seluruh jajaran dalam menjalankan fungsi organisasi secara menyeluruh dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Lebih lanjut Renja yang disusun disetiap awal tahun menggambarkan keterkaitan program kerja yang ditetapkan Unit Pusat agar *inline* dan sistematis dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

B. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah dibantu 4 (empat) Divisi yaitu:

1) Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Selanjutnya, Divisi Administrasi menjalankan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2) Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3) Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan

- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

4) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Adapun fungsi yang dijalankan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM adalah:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

C. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang semakin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY didukung sumber daya manusia yang berkompeten sebanyak 226 pegawai yang terdiri dari 118 (Laki-laki) dan 108 (Perempuan). Adapun rincian ASN di Kantor Wilayah DIY sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :
 - o SMA : 29 Pegawai
 - o D3 : 10 Pegawai
 - o D4 : 1 Pegawai

- S1 : 102 Pegawai
 - S2 : 76 Pegawai
 - S3 : 1 Pegawai
- Jumlah pegawai berdasarkan Eselon :
- IIa : 1 Pegawai
 - IIb : 4 Pegawai
 - IIIa : 9 Pegawai
 - IVa : 18 Pegawai
- Kantor Wilayah memiliki pegawai dengan jabatan fungsional tertentu (JFT) agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan optimal, dengan rincian:

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Perancang Peraturan perundang-undangan Pertama	16
2	Perancang Peraturan perundang-undangan Muda	10
3	Perancang Peraturan perundang-undangan Madya	1
4	Penyuluh Hukum Pertama	1
5	Penyuluh Hukum Muda	9
6	Penyuluh Hukum Madya	12
7	Analisis Hukum Pertama	4
8	Analisis Hukum Muda	4
9	Analisis Hukum Madya	3
10	Analisis Keimigrasian Madya	2
11	Analisis Keimigrasian Muda	2
12	Analisis Kepegawaian Pertama	2
13	Analisis Kepegawaian Muda	4
13	Arsiparis Ahli Pertama	6
14	Arsiparis Ahli Muda	2
15	Analisis Anggaran Pertama	1
16	Paranata Komputer Pertama	4
17	Paranata Komputer Muda	2
18	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama (Setjen)	2
19	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda (Setjen)	5
20	Pranata Humas Pertama	1
21	Pranata Keuangan APBN Trampil	1
22	Pembina Keamanan Masyarakat Madya	1
TOTAL		94

Selain ASN tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY juga didukung oleh tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 6 orang yang penugasannya dikhususkan pada pemberian layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

D. Kondisi Saat Ini

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Dalam rangka menjalankan tugas fungsinya, Kantor Wilayah senantiasa dituntut untuk mampu melakukan inovasi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Hukum dan HAM. Oleh karena itu, Kantor Wilayah melakukan identifikasi mandiri / *self assessment* atas kondisi yang ada saat ini dengan hasil sebagai berikut:

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta memiliki wilayah kerja yaitu meliputi 5 Kabupaten/Kota, dimana terdapat 16 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar terdiri dari 15 UPT Pemasaryakatan dan 1 UPT Keimigrasian.
- Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki memiliki jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, budaya yang beragam seperti berbagai jenis kreasi tarian, kreasi corak batik, dan hasil komoditi lokal dari fakta tersebut berbanding lurus dengan peningkatan pendaftaran merek, Kekayaan Intelektual Komunal/ Indikasi Geografis dan pendaftaran satuan usaha/badan usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah DIY, hal ini membuktikan bahwa kantor wilayah telah sukses dan terus berupaya dengan optimal dalam peningkatan pelayananan kekayaan intelektual.
- Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan tusi khususnya dalam pemberian pelayanan kepada publik. Untuk itu, Kantor Wilayah DIY terus melakukan upaya dan koordinasi kepada Unit Pusat terutama Sekretariat Jenderal sebagai pemangku program terkait administratif fasilitatif.

E. Kondisi Yang Diharapkan

Dalam menjalankan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tentu saja terdapat beberapa kondisi ideal dimana hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut beberapa kondisi ideal yang diharapkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta :

- Sarana dan Prasarana yang *representative*
Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja pegawai, karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan perkantoran. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, pegawai akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. Selain dalam hal pencapaian kerja, sarana dan prasarana yang ada akan membuat pegawai nyaman dalam bekerja serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan optimal
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB III. RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta T.A. 2024 diawali dengan tahapan penyusunan analisa kebutuhan yang merupakan penyusunan pagu kebutuhan sesuai dengan kondisi riil yang dibutuhkan dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan proyeksi pelaksanaan tahun berjalan. Langkah berikutnya penyusunan anggaran dilanjutkan dengan pagu indikatif hingga pagu alokasi yang disahkan dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selain tahapan tersebut diatas, penyusunan Renja juga berpedoman pada kerangka pendanaan Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi sebagai pedoman strategi percepatan pelaksanaan kegiatan pada 4 (empat) program utama yang diemban di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024 di Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta terdiri dari 4 kerangka utama, yakni Perencanaan Kinerja, Perencanaan Penganggaran, Rencana Penarikan Dana (Disbursement Plan) dan Kalender Kerja.

A. Rencana Kinerja

Renja Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta T.A. 2024 memuat perencanaan kinerja yang dijabarkan per Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Targetnya.

NO	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		
2	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	
	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%
PROGRAM PENEKAKAN DAN PELAYANAN HUKUM		
5252 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	
	Indeks Penyelenggaraan Pemsarakatan di Wilayah	83
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14

NO	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM		
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		
3	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	
	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
4	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	
	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88%
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		
5	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	
	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks
6	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	
	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70%
	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17%
4841 - Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah		
7	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDH di wilayah	
	Persentase anggota JDH yang dikelola terhadap total anggota JDH di wilayah	25%
8	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	
	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%
	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80%
9	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	
	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%
PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI		
5256 - Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		
1	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Perda	
	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan dan jumlah fasilitasi perencanaan Perda	2 Kegiatan
5250 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah		
2	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	
	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80%
3	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang

NO	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM		
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah		
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah
	Jumlah Kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	
	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi

B. Rencana Anggaran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta mengemban 4 (empat) program utama, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan oleh Divisi Administrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini dilaksanakan oleh Divisi Pemasarakatan, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Bidang Pelayanan Hukum dan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH.

3. Program Pembentukan Regulasi

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

4. Program Pemajuan dan Penegakan HAM

Program ini dilaksanakan oleh Subbidang Pemajuan HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta mengelola 9 (sembilan) DIPA dengan total alokasi anggaran T.A. 2024 sebesar **Rp 34.949.784.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
Program Dukungan Manajemen		Rp 23.763.067.000
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 23.487.706.000
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp 275.361.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp 10.277.932.000
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp 2.467.483.000
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.439.601.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 901.269.000
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.871.760.000
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.597.819.000
Program Pembentukan Regulasi		Rp 668.890.000
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 520.000.000
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 148.890.000
Program Pemajuan dan Penegakan HAM		Rp 239.895.000
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp 239.895.000
TOTAL		Rp 34.949.784.000

C. Rencana Penarikan Dana (*Disbursement Plan*) dan Kalender Kerja

Disbursement Plan atau Rencana Penarikan Dana (RPD) merupakan rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA. Dalam penyusunannya, RPD tak terpisahkan dengan Kalender Kerja dimana Kalender Kerja disusun harus selaras dan sinkron dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan. Adapun target *Disbursement Plan* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta T.A. 2024 yang telah ditetapkan secara per triwulan sebagai berikut:

- ✚ Triwulan I : 19,93%
- ✚ Triwulan II : 51,37%
- ✚ Triwulan III : 77,45%
- ✚ Triwulan IV : 100%

Rincian *Disbursement Plan* dan Kalender Kerja pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta T.A. 2024 disajikan terpisah sebagaimana terlampir.

BAB IV. PENUTUP

Renja Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta T.A. 2024 diharapkan responsif dalam mencapai target Kementerian Hukum dan HAM dan pembangunan yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan kepada publik. Sebagai penjabaran tahun terakhir pelaksanaan Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, Renja menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan program dan pencapaian target pembangunan pada periode tahun sebelumnya serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk tahun berikutnya.

Secara khusus penyusunan Renja T.A. 2024 tetap terus melakukan penguatan dengan melibatkan seluruh unsur admisnitratif dan fasilitatif di lingkungan Kantor Wilayah dari awal hingga akhir penyusunan. Oleh karena itu, dokumen Renja K/L ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan acuan baik oleh Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta maupun pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Yogyakarta, 8 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

Lampiran-lampiran

- A. RKA Satker Bagian A dan B
- B. Rincian Kertas Kerja Satker
- C. *Disbursement Plan* / Rencana Penarikan Dana
- D. Kalender Kerja
- E. Perjanjian Kinerja

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 SATUAN KERJA : (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
 PROPINSI : (04) DI YOGYAKARTA
 LOKASI : (51) KOTA YOGYAKARTA

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen		23,487,706,000		23,487,706,000
	Sasaran Program : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI				
	Indikator Kinerja Program :				
07	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI				
07.01	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"				
07.02	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90				
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		23,487,706,000		23,487,706,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 04.51 KOTA YOGYAKARTA <i>Indikator KRO</i>	6.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	21,105,716,000		21,105,716,000
956	Layanan BMN <i>Indikator RO</i>	1.00 Layanan	96,760,000		96,760,000
01	Persentase satuan kerja yang data BMN-nya tercatat, tervalidasi dan akurat				
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi <i>Indikator RO</i>	1.00 Layanan	245,604,000		245,604,000
01	Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat				
959	Layanan Protokoler <i>Indikator RO</i>	1.00 Layanan	81,702,000		81,702,000
01	Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah sesuai dengan peraturan				
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal <i>Indikator RO</i>	1.00 Layanan	12,350,000		12,350,000
01	Jumlah Layanan Fasilitas Ketatalaksanaan dan Kelembagaan yang dilaksanakan oleh Kanwil				
962	Layanan Umum <i>Indikator RO</i>	1.00 Layanan	132,329,000		132,329,000
01	Indeks kepuasan pengguna layanan umum				
994	Layanan Perkantoran <i>Indikator RO</i>	1.00 Layanan	20,536,971,000		20,536,971,000
01	Persentase Realisasi Belanja Pegawai dan Pemeliharaan Kantor				
1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 04.51 KOTA YOGYAKARTA <i>Indikator KRO</i>	34.00 Unit, m2, Paket	535,000,000		535,000,000
951	Layanan Sarana Internal <i>Indikator RO</i>	34.00 Unit	535,000,000		535,000,000
01	Jumlah Layanan Pengadaan Sarana internal kantor Wilayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan				
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 04.51 KOTA YOGYAKARTA <i>Indikator KRO</i>	1.00 Orang, Layanan, Rekomendasi	605,910,000		605,910,000
954	Layanan Manajemen SDM <i>Indikator RO</i>	1.00 Layanan	605,910,000		605,910,000

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
SATUAN KERJA : (409181) **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**
PROPINSI : (04) **DI YOGYAKARTA**
LOKASI : (51) **KOTA YOGYAKARTA**

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM				
1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 04.51 KOTA YOGYAKARTA <i>Indikator KRO</i>	5.00 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1,241,080,000		1,241,080,000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran <i>Indikator RO</i>	1.00 Dokumen	404,058,000		404,058,000
01	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome				
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi <i>Indikator RO</i>	1.00 Dokumen	324,270,000		324,270,000
01	Persentase satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki LAKIP				
955	Layanan Manajemen Keuangan <i>Indikator RO</i>	1.00 Dokumen	285,102,000		285,102,000
01	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan				
961	Layanan Reformasi Kinerja <i>Indikator RO</i>	1.00 Dokumen	101,050,000		101,050,000
01	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi				
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan <i>Indikator RO</i>	1.00 Dokumen	126,600,000		126,600,000

YOGYAKARTA, 11 JANUARI 2024



AGUNG REKTONO SETO

NIP. 197012021999031001

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (013) **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
PROGRAM : (013.01.WA) **Program Dukungan Manajemen**
SATUAN KERJA : (409181) **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**
PROPINSI : (04) **DI YOGYAKARTA**
LOKASI : (51) **KOTA YOGYAKARTA**

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen		23,487,706,000		23,487,706,000		
	<u>Sasaran Program :</u> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI.						
	<u>Indikator Kinerja Program :</u>						
	07.01 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"						
	07.02 Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90						
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor (Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)		23,487,706,000		23,487,706,000		
1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	6 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	21,105,716,000		21,105,716,000		KD
1558.EBA.956	Lokasi : KOTA YOGYAKARTA Layanan Bmn	1.0 Layanan	96,760,000		96,760,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		96,760,000		96,760,000		
051	Pembinaan dan Pengelolaan BMN		53,680,000		53,680,000		
052	Monitoring dan Pelaporan BMN		43,080,000		43,080,000		
1558.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi	1.0 Layanan	245,604,000		245,604,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		245,604,000		245,604,000		
051	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik		149,750,000		149,750,000		
052	Pelaksanaan Kehumasan		95,854,000		95,854,000		
1558.EBA.959	Layanan Protokoler	1.0 Layanan	81,702,000		81,702,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		81,702,000		81,702,000		
051	Koordinasi Keprotokoleran		8,800,000		8,800,000		
052	Pelaksanaan Keprotokoleran		72,902,000		72,902,000		
1558.EBA.960	Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan	12,350,000		12,350,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		12,350,000		12,350,000		
051	Fasilitasi Ketatalaksanaan		7,900,000		7,900,000		
052	Fasilitasi Kelembagaan		4,450,000		4,450,000		
1558.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	132,329,000		132,329,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		132,329,000		132,329,000		
051	Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ		97,329,000		97,329,000		
052	Pengelolaan Perpustakaan		15,000,000		15,000,000		
053	Pengelolaan Kesehatan Pegawai		20,000,000		20,000,000		
1558.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	20,536,971,000		20,536,971,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		20,536,971,000		20,536,971,000		
001	Gaji dan Tunjangan		15,463,117,000		15,463,117,000		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5,073,854,000		5,073,854,000		
1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	34 Unit, m2, Paket	535,000,000		535,000,000		KD
1558.EBB.951	Lokasi : KOTA YOGYAKARTA Layanan Sarana Internal	34.0 Unit	535,000,000		535,000,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		535,000,000		535,000,000		
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		115,000,000		115,000,000		
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		420,000,000		420,000,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 PROGRAM : (013.01.WA) Program Dukungan Manajemen
 SATUAN KERJA : (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
 PROPINSI : (04) DI YOGYAKARTA
 LOKASI : (51) KOTA YOGYAKARTA

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]	1 Orang, Layanan, Rekomendasi	605,910,000		605,910,000		KD

1558.EBC.954	Lokasi : KOTA YOGYAKARTA Layanan Manajemen Sdm	1.0 Layanan	605,910,000		605,910,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		605,910,000		605,910,000		
051	Administrasi Kepegawaian		313,750,000		313,750,000		
052	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian		292,160,000		292,160,000		
1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	5 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1,241,080,000		1,241,080,000		KD

1558.EBD.952	Lokasi : KOTA YOGYAKARTA Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	1.0 Dokumen	404,058,000		404,058,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		404,058,000		404,058,000		
051	Layanan Perencanaan		23,600,000		23,600,000		
052	Layanan Penganggaran		160,500,000		160,500,000		
053	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran		219,958,000		219,958,000		
1558.EBD.953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	1.0 Dokumen	324,270,000		324,270,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		324,270,000		324,270,000		
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja		227,052,000		227,052,000		
052	Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan		7,800,000		7,800,000		
053	Penyusunan Manajemen Risiko		42,274,000		42,274,000		
054	Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)		47,144,000		47,144,000		
1558.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen	285,102,000		285,102,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		285,102,000		285,102,000		
051	Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan		217,072,000		217,072,000		
052	Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan		68,030,000		68,030,000		
1558.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen	101,050,000		101,050,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		101,050,000		101,050,000		
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		20,100,000		20,100,000		
052	Pembentukan Satker WBK/WBBM		47,830,000		47,830,000		
053	Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi		18,000,000		18,000,000		
054	Pembangunan Budaya Anti Korupsi		15,120,000		15,120,000		
1558.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Dokumen	126,600,000		126,600,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		126,600,000		126,600,000		
051	Pengelolaan Kearsipan		15,000,000		15,000,000		
052	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan		111,600,000		111,600,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 PROGRAM : (013.01.WA) Program Dukungan Manajemen
 SATUAN KERJA : (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
 PROPINSI : (04) DI YOGYAKARTA
 LOKASI : (51) KOTA YOGYAKARTA

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

TOTAL	2024	2023
RM	23,487,706,000	
PLN	0	
RMP	0	
PNP	0	
BLU	0	
HIBAH	0	
PDN	0	
SBSN	0	
	23,487,706,000	

YOGYAKARTA, 11 JANUARI 2024



AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.01.WA 1558 1558.EBA	Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			23,487,706,000 23,487,706,000 21,105,716,000	
1558.EBA.956	Lokasi : KOTA YOGYAKARTA Layanan BMN	1.0 Layanan		96,760,000	
051	Pembinaan dan Pengelolaan BMN			53,680,000	
A	Penatausahaan BMN			53,680,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.030-Yogyakarta)			15,750,000	RM
	- ATK	2.0 pkt	2,000,000	4,000,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2.0 pkt	1,000,000	2,000,000	
	- Konsumsi Kudapan Rapat [50 org x 3 kali]	150.0 ok	15,000	2,250,000	
	- Konsumsi Makan Rapat [50 org x 3 kali]	150.0 ok	50,000	7,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.030-Yogyakarta)			31,130,000	RM
	> KOORDINASI KE JAKARTA			31,130,000	
	- Tiket PP [5 org x 1 keg]	5.0 ok	2,268,000	11,340,000	
	- Uang Harian [5 org x 1 keg x 3 hari]	15.0 oh	530,000	7,950,000	
	- Biaya Penginapan [5 org x 1 keg x 2 hari]	10.0 OH	730,000	7,300,000	
	- Taksi Jakarta [5 org x 1 keg x 2 kali]	10.0 ok	256,000	2,560,000	
	- Taksi Jogja [5 org x 1 keg x 2 kali]	10.0 ok	198,000	1,980,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.030-Yogyakarta)			6,800,000	RM
	- Transport Lokal Koordinasi [8 org x 5 kali]	40.0 ok	170,000	6,800,000	
052	Monitoring dan Pelaporan BMN			43,080,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			43,080,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.030-Yogyakarta)			1,000,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan laporan	2.0 pkt	500,000	1,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.030-Yogyakarta)			35,280,000	RM
	>> MONITORING KE DAERAH		0	35,280,000	
	- Uang Harian [7 org x 3 keg x 4 hari]	84.0 oh	420,000	35,280,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.030-Yogyakarta)			6,800,000	RM
	- Transport Lokal Koordinasi [2 org x 20 kali]	40.0 ok	170,000	6,800,000	
1558.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan		245,604,000	
051	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik			149,750,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Penyediaan Informasi Publik</i>			149,750,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			91,750,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 pkt	1,000,000	1,000,000	
	- Dokumentasi	1.0 thn	1,000,000	1,000,000	
	- Spanduk, Backdrop, Banner	1.0 thn	80,000,000	80,000,000	
	- Kudapan Rapat [50 org x 3 kali]	150.0 ok	15,000	2,250,000	
	- Konsumsi Makan Rapat [50 org x 3 kali]	150.0 ok	50,000	7,500,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			58,000,000	RM
	- Iklan	1.0 thn	40,000,000	40,000,000	
	- Press Conference	1.0 thn	3,000,000	3,000,000	
	- Video	1.0 thn	3,000,000	3,000,000	
	- Buletin Kehumasan	1.0 thn	12,000,000	12,000,000	
052	Pelaksanaan Kehumasan			95,854,000	
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>95,854,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			10,050,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 pkt	300,000	300,000	
	- Kudapan Rapat [25 org x 6 kali]	150.0 ok	15,000	2,250,000	
	- Konsumsi Makan Rapat [25 org x 6 kali]	150.0 ok	50,000	7,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			68,804,000	RM
	> Koordinasi ke Pusat			68,804,000	
	- Tiket [2 org x 2 kali]	4.0 ok	2,268,000	9,072,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 org x 2 kali x 2 hari]	8.0 OH	730,000	5,840,000	
	- Uang Harian [2 org x 2 kali x 3 hari]	12.0 oh	530,000	6,360,000	
	- Taksi Jogja [2 org x 2 keg x 2 kl]	8.0 ok	198,000	1,584,000	
	- Taksi Jakarta [2 org x 2 keg x 2 kl]	8.0 ok	256,000	2,048,000	
	>> Peliputan Kegiatan Kehumasan		0	43,900,000	
	- Transport Liputan Berita Luar Kota [2 org x 50 kl]	100.0 ok	250,000	25,000,000	
	- Uang Harian [5 org x 3 kl x 3 upt]	45.0 oh	420,000	18,900,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			17,000,000	RM
	- Transport Lokal Liputan Dalam Kota [2 org x 50 kali]	100.0 ok	170,000	17,000,000	
1558.EBA.959	Layanan Protokoler	1.0 Layanan		81,702,000	
051	Koordinasi Keprotokoleran			8,800,000	
A	<i>koordinasi Keprotokoleran</i>			<i>8,800,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			300,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 pkt	300,000	300,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			8,500,000	RM
	- Transport Lokal [5 org x 10 kl]	50.0 ok	170,000	8,500,000	
052	Pelaksanaan Keprotokoleran			72,902,000	
A	<i>Pelaksanaan Keprotokoleran</i>			<i>72,902,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			300,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 pkt	300,000	300,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			10,000,000	RM
	- VVIP Lounge Bandara	1.0 thn	10,000,000	10,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			45,050,000	RM
	- Sewa Mobil Insidentil [1 unit x 5 kali x 2 hari]	10.0 uh	905,000	9,050,000	
	- Sewa Mobil Alphard [1 unit x 3 kali x 2 hari]	6.0 uh	3,500,000	21,000,000	
	- Sewa Mobil Pajero [1 unit x 3 kali x 2 hari]	6.0 uh	2,500,000	15,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			12,452,000	RM
	- Tiket PP [2 org x 1 kali]	2.0 ok	2,268,000	4,536,000	
	- Uang Harian [2 org x 1 kali x 3 hari]	6.0 oh	530,000	3,180,000	
	- Biaya Penginapan [2 org x 1 kali x 2 hari]	4.0 oh	730,000	2,920,000	
	- Taksi Jogja [2 org x 1 keg x 2 kali]	4.0 ok	198,000	792,000	
	- Taksi Jakarta [2 org x 1 keg x 2 kali]	4.0 ok	256,000	1,024,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			5,100,000	RM
	- Transport Lokal [5 org x 6 kali]	30.0 ok	170,000	5,100,000	
1558.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan		12,350,000	
051	Fasilitas Ketatalaksanaan			7,900,000	
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>7,900,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			7,900,000	RM
	- ATK	2.0 pkt	500,000	1,000,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2.0 pkt	200,000	400,000	
	- Kudapan Rapat [50 org x 2 kali]	100.0 ok	15,000	1,500,000	
	- Konsumsi Makan Rapat [50 org x 2 kali]	100.0 ok	50,000	5,000,000	
052	Fasilitas Kelembagaan			4,450,000	
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>4,450,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			4,450,000	RM
	- ATK	1.0 pkt	1,000,000	1,000,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 pkt	200,000	200,000	
	- Kudapan Rapat [50 org x 1 kali]	50.0 ok	15,000	750,000	
	- Konsumsi Makan Rapat [50 org x 1 kali]	50.0 ok	50,000	2,500,000	
1558.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		132,329,000	
051	Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ			97,329,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			97,329,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			5,925,000	RM
	- ATK	3.0 pkt	500,000	1,500,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	3.0 pkt	500,000	1,500,000	
	- Konsumsi Kudapan Rapat [15 org x 3 kali]	45.0 ok	15,000	675,000	
	- Konsumsi Makan Rapat [15 org x 3 kali]	45.0 ok	50,000	2,250,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			54,600,000	RM
	> HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA			54,600,000	
	- Sekretaris / Staf Pendukung UKPBJ [7 org x 12 bln]	84.0 ob	650,000	54,600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			24,904,000	RM
	> PUSAT			24,904,000	
	- Tiket PP [4 org x 1 kali]	4.0 ok	2,268,000	9,072,000	
	- Uang Harian [4 org x 1 kali x 3 hari]	12.0 oh	530,000	6,360,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III [4 org x 1 kali x 2 hari]	8.0 OH	730,000	5,840,000	
	- Taksi Jakarta [4 org x 1 kali x 2 keg]	8.0 ok	256,000	2,048,000	
	- Taksi Jogja [4 org x 1 kgt x 2 kali]	8.0 ok	198,000	1,584,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			11,900,000	RM
	- Transport Lokal Koordinasi [7 org x 10 kali]	70.0 ok	170,000	11,900,000	
052	Pengelolaan Perpustakaan			15,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			15,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			15,000,000	RM
	- Fumigasi/Perawatan Perpustakaan	1.0 PKT	15,000,000	15,000,000	
053	Pengelolaan Kesehatan Pegawai			20,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			20,000,000	RM
	- Poliklinik/Obat-obatan Pegawai	1.0 pkt	20,000,000	20,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1558.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		20,536,971,000	
001	Gaji dan Tunjangan			15,463,117,000	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			15,264,212,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.030-Yogyakarta)			10,232,600,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	8,770,800,000	8,770,800,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	730,900,000	730,900,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	730,900,000	730,900,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.030-Yogyakarta)			168,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	144,000	144,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,000	12,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,000	12,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.030-Yogyakarta)			776,160,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	665,280,000	665,280,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	55,440,000	55,440,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	55,440,000	55,440,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.030-Yogyakarta)			245,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	210,000,000	210,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	17,500,000	17,500,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	17,500,000	17,500,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.030-Yogyakarta)			456,400,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	391,200,000	391,200,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	32,600,000	32,600,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	32,600,000	32,600,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.030-Yogyakarta)			868,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	744,000,000	744,000,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	62,000,000	62,000,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	62,000,000	62,000,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.030-Yogyakarta)			168,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Pph PNS	1.0 THN	144,000,000	144,000,000	
	- Belanja Tunj.angan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 THN	12,000,000	12,000,000	
	- Belanja Tunj.angan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 THN	12,000,000	12,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			625,000,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	625,000,000	625,000,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			1,598,884,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	1,598,884,000	1,598,884,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			294,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	252,000,000	252,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	21,000,000	21,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	21,000,000	21,000,000	
<i>B</i>	<i>Belanja Lembur Pegawai</i>			198,905,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			198,905,000	RM
	- Belanja Uang Lembur Golongan II [20 peg x 3 jam x 7 kali]	420.0 oj	24,000	10,080,000	
	- Belanja Uang Lembur Golongan III [167 peg x 3 jam x 7 kali]	3507.0 oj	30,000	105,210,000	
	- Belanja Uang Lembur Golongan IV [34 peg x 3 jam x 7 kali]	714.0 oj	36,000	25,704,000	
	- Belanja Uang Makan Lembur Golongan II [20 peg x 7 kali]	140.0 oh	35,000	4,900,000	
	- Belanja Uang Makan Lembur Golongan III [167 peg x 7 kali]	1169.0 oh	37,000	43,253,000	
	- Belanja Uang Makan Lembur Golongan IV [34 peg x 7 kali]	238.0 oh	41,000	9,758,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			5,073,854,000	
<i>A</i>	<i>Pakaian Dinas (Pakaian Jadi)</i>			19,050,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			19,050,000	RM
	- Satpam [13 org x 1 stell]	13.0 stel	850,000	11,050,000	
	- Pramubakti/OB [11 org x 1 stell]	11.0 stel	500,000	5,500,000	
	- Sopir [5 org x 1 stell]	5.0 stel	500,000	2,500,000	
<i>B</i>	<i>Pemeliharaan Gedung</i>			537,506,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			487,506,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Wisma Tamu	277.0 M2	111,000	30,747,000	
	- Pemeliharaan Gedung Pamer Karya Napi	244.0 M2	111,000	27,084,000	
	- Pemeliharaan Halaman Wisma Tamu dan Gedung Pamer Karya Napi	528.0 M2	10,000	5,280,000	
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat	1945.0 M2	168,000	326,760,000	
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat	625.0 M2	111,000	69,375,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	2826.0 M2	10,000	28,260,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523112	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			50,000,000	RM
	- Persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan	1.0 thn	50,000,000	50,000,000	
C	<i>Pemeliharaan Peralatan Perkantoran</i>			211,138,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			211,138,000	RM
	- Pemeliharaan Personal Computer	79.0 unit	500,000	39,500,000	
	- Pemeliharaan Notebook	15.0 unit	500,000	7,500,000	
	- Pemeliharaan Laptop	80.0 unit	500,000	40,000,000	
	- Pemeliharaan Printer	58.0 unit	500,000	29,000,000	
	- Pemeliharaan AC Central	2.0 unit	500,000	1,000,000	
	- Pemeliharaan AC Split	79.0 unit	500,000	39,500,000	
	- Pemeliharaan Genset 100 KVA	1.0 unit	10,000,000	10,000,000	
	- Sound system	1.0 unit	1,908,000	1,908,000	
	- Pemeliharaan Kamera digital	5.0 unit	300,000	1,500,000	
	- Perangkat Teleconference	1.0 unit	3,000,000	3,000,000	
	- Mesin pemotong rumput	1.0 unit	500,000	500,000	
	- Scanner	16.0 unit	350,000	5,600,000	
	- LCD	5.0 unit	500,000	2,500,000	
	- Televisi	17.0 unit	350,000	5,950,000	
	- Inventaris Kantor	221.0 peg	80,000	17,680,000	
	- Server	3.0 unit	2,000,000	6,000,000	
D	<i>Pemeliharaan Kendaraan</i>			548,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			22,800,000	RM
	- Pengurusan STNK Roda 2	15.0 unit	300,000	4,500,000	
	- Pengurusan STNK Roda 3	1.0 unit	300,000	300,000	
	- Pengurusan STNK Roda 4	12.0 unit	1,500,000	18,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			526,000,000	RM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 2	15.0 unit	5,000,000	75,000,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 3	1.0 unit	5,000,000	5,000,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan Dinas Roda 4	11.0 unit	40,000,000	440,000,000	
	- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Penyuluhan Hukum Keliling	1.0 unit	6,000,000	6,000,000	
E	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			508,200,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			12,000,000	RM
	- Pos	12.0 bln	1,000,000	12,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			480,000,000	RM
	- Listrik	12.0 bln	40,000,000	480,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			12,000,000	RM
	- Telepon	12.0 bln	1,000,000	12,000,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			4,200,000	RM
	- Gas	12.0 bln	350,000	4,200,000	
F	<i>Keperluan Perkantoran</i>			1,457,958,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			1,304,458,000	RM
	- Keperluan Pokok	221.0 OT	500,000	110,500,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan [11 org x 13 bln]	143.0 ob	3,000,000	429,000,000	
	- Honorarium Satpam / Jasa Keamanan [13 org x 13 bln]	169.0 ob	3,187,000	538,603,000	
	- Honorarium Sopir [5 org x 13 bln]	65.0 ob	3,187,000	207,155,000	
	- Retribusi Sampah	12.0 bln	350,000	4,200,000	
	- Pembayaran PBB	1.0 thn	15,000,000	15,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			153,500,000	RM
	- ATK	1.0 thn	150,000,000	150,000,000	
	- Persediaan Materai	350.0 lbr	10,000	3,500,000	
G	<i>Konsultasi dan Koordinasi</i>			306,720,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			306,720,000	RM
	- Tiket [3 org x 12 kali]	36.0 ok	2,268,000	81,648,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II [3 org x 12 kali x 2 hari]	72.0 oh	2,000,000	144,000,000	
	- Uang Harian [3 org x 12 kali x 3 hari]	108.0 oh	530,000	57,240,000	
	- Taksi Jakarta [3 org x 12 keg x 2 kl]	72.0 ok	256,000	18,432,000	
	- Uang Representatif [3 org x 12 kali]	36.0 oh	150,000	5,400,000	
H	<i>Jamuan Tamu Pimpinan</i>			290,060,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			290,060,000	RM
	- Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Tamu	1.0 thn	273,600,000	273,600,000	
	- Plakat/Cinderamata	1.0 thn	16,460,000	16,460,000	
I	<i>Honor Operasional Satker</i>			97,872,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			97,872,000	RM
	> HONOR PENGELOLA KEUANGAN			97,872,000	
	- Kuasa Pengguna Anggaran [1 org x 12 bln]	12.0 ob	1,368,000	16,416,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen Divisi Administrasi [1 org x 12 bln]	12.0 ob	1,168,000	14,016,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen Divisi Pelayanan Hukum dan HAM [1 org x 12 bln]	12.0 ob	1,008,000	12,096,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen Divisi Masyarakat [1 org x 12 bln]	12.0 ob	644,000	7,728,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen Divisi Keimigrasian [1 org x 12 bln]	12.0 ob	764,000	9,168,000	
	- Pejabat Penguji SPM [1 org x 12 bln]	12.0 ob	608,000	7,296,000	
	- Bendahara Pengeluaran [1 org x 12 bln]	12.0 ob	528,000	6,336,000	
	- BPP DIPA Sekjen, BPHN, AHU, PP dan Balitbangham [1 org x 12 bln]	12.0 ob	392,000	4,704,000	
	- BPP DIPA PAS, IMIGRASI dan KI [1 org x 12 bln]	12.0 ob	256,000	3,072,000	
	- Honor SAIBA [6 org x 12 bln]	72.0 ob	60,000	4,320,000	
	- Honor SABMN [1 org x 12 bln]	12.0 ob	60,000	720,000	
	- Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai [1 org x 12 bln]	12.0 ob	500,000	6,000,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 org x 12 bln]	12.0 OB	500,000	6,000,000	
<i>J</i>	<i>Sewa Operasional Perkantoran</i>			<i>1,041,800,000</i>	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			921,800,000	RM
	- Sewa Gudang Arsip [1 unit x 1 thn]	1.0 ub	80,000,000	80,000,000	
	- Sewa Kendaraan Pejabat Eselon II A [1 Unit x 12 bulan]	12.0 ub	14,030,000	168,360,000	
	- Sewa Kendaraan Pejabat Eselon II B [4 Unit x 12 bulan]	48.0 ub	14,030,000	673,440,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			120,000,000	RM
	- BBM Sewa Kendaraan Pejabat Eselon II [5 Unit x 1 thn]	5.0 UT	24,000,000	120,000,000	
<i>K</i>	<i>Pelantikan/Sumpah Jabatan</i>			<i>54,750,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			48,750,000	RM
	- Konsumsi makan [150 org x 5 kali]	750.0 ok	50,000	37,500,000	
	- Konsumsi Kudapan [150 org x 5 kali]	750.0 ok	15,000	11,250,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			6,000,000	RM
	- Honor Rohaniwan [3 org x 5 kali]	15.0 ok	400,000	6,000,000	
1558.EBB	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]</u>	34.0 Unit, m2, Paket		535,000,000	
	Lokasi : KOTA YOGYAKARTA				
1558.EBB.951	<u>Layanan Sarana Internal</u>	34.0 Unit		535,000,000	
052	<u>Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</u>			115,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			115,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			115,000,000	RM
	- Computer Editing	1.0 unit	30,000,000	30,000,000	
	- Laptop	2.0 unit	25,000,000	50,000,000	
	- Lensa Kamera	1.0 unit	35,000,000	35,000,000	
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			420,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			420,000,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			420,000,000	RM
	- Workstation	30.0 unit	14,000,000	420,000,000	
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	1.0 Orang, Layanan, Rekomendasi		605,910,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
1558.EBC.954	Lokasi : KOTA YOGYAKARTA Layanan Manajemen SDM	1.0 Layanan		605,910,000	
051	Administrasi Kepegawaian			313,750,000	
A	Biaya Mutasi, Promosi dalam Lingkungan Kanwil (es IV, V,JFU)			28,200,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			18,000,000	RM
	- Pengemasan [30 org x 10 M3]	300.0 M3	60,000	18,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			10,200,000	RM
	- Transport Antar Kabupaten [30 org x 2 kali]	60.0 ok	170,000	10,200,000	
B	Pelaksanaan Ujian Dinas Tk. I, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penilaian JFT			23,150,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			14,650,000	RM
	- Kudapan Pelaksanaan [70 org x 3 kali]	210.0 ok	15,000	3,150,000	
	- Konsumsi Makan Pelaksanaan [70 org x 3 kali]	210.0 ok	50,000	10,500,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	1.0 pkt	1,000,000	1,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			8,500,000	RM
	- Transport Lokal [10 org x 5 kali x 1 kota]	50.0 ok	170,000	8,500,000	
C	Orientasi CPNS			35,300,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			13,700,000	RM
	- Kudapan Rapat [60 org x 3 kali]	180.0 ok	15,000	2,700,000	
	- Konsumsi Makan [60 org x 3 kali]	180.0 ok	50,000	9,000,000	
	- Spanduk	1.0 pkt	1,000,000	1,000,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	1.0 pkt	1,000,000	1,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			21,600,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Kumham [2 org x 4 jp x 3 kali]	24.0 oj	900,000	21,600,000	
<i>E</i>	<i>Pengadaan Catar POLTEKIP dan POLTEKIM</i>			227,100,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			57,000,000	RM
	- Penggandaan, photocopy, dan penjiilidan	3.0 pkt	1,000,000	3,000,000	
	- Perlengkapan Panitia	1.0 pkt	5,000,000	5,000,000	
	- Konsumsi rapat makan [40 org x 3 kali]	120.0 ok	50,000	6,000,000	
	- Kudapan rapat [40 org x 3 kali]	120.0 ok	15,000	1,800,000	
	- Konsumsi makan SKD [70 org x 4 hari x 1 kali]	280.0 ok	50,000	14,000,000	
	- Konsumsi snack SKD [70 org x 4 hari]	280.0 ok	15,000	4,200,000	
	- Konsumsi makan tes kesehatan [30 org x 4 hari x 1 kali]	120.0 ok	50,000	6,000,000	
	- Konsumsi snack tes kesehatan [30 org x 4 hari x 1 kali]	120.0 ok	15,000	1,800,000	
	- Konsumsi makan tes kesamaptaan [50 org x 2 hari x 1 kali]	100.0 ok	50,000	5,000,000	
	- Konsumsi Snack tes kesamaptaan [50 org x 2 hari x 1 kali]	100.0 ok	15,000	1,500,000	
	- Konsumsi makan tes Psikotes [20 org x 5 hari x 1 kali]	100.0 ok	50,000	5,000,000	
	- Konsumsi snack tes Psikotes [20 org x 5 hari x 1 kali]	100.0 ok	15,000	1,500,000	
	- ATK	1.0 pkt	2,200,000	2,200,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			65,100,000	RM
	- Sewa Laptop dan Jaringan Tes Psikotes [50 unit x 5 hari]	250.0 uh	150,000	37,500,000	
	- Sewa Meja Tes Psikotes [60 unit x 5 hari]	300.0 uh	20,000	6,000,000	
	- Sewa Bilik Meja, Kursi Tes Kesehatan [4 unit x 4 hari]	16.0 uh	350,000	5,600,000	
	- Sewa Tenda [8 unit x 5 hari]	40.0 uh	400,000	16,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			105,000,000	RM
	- Uang Harian [50 org x 5 hari]	250.0 oh	420,000	105,000,000	
052	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian			292,160,000	
<i>A</i>	<i>Pembinaan Kepegawaian dan Baperjakat Eselon IV/V/JP/JF</i>			<i>209,750,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			5,500,000	RM
	- ATK	1.0 pkt	2,000,000	2,000,000	
	- Penggandaan dan Penjiilidan Laporan	1.0 pkt	500,000	500,000	
	- Kudapan Rapat [10 org x 3 keg]	30.0 ok	15,000	450,000	
	- Konsumsi Makan Rapat [10 org x 3 keg]	30.0 ok	50,000	1,500,000	
	- Spanduk	1.0 pkt	1,050,000	1,050,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.030-Yogyakarta) - Honor Narasumber Eksternal Kumham Eselon III [2 org x 3 jp x 4 kali]	24.0 oj	900,000	21,600,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta) > Koordinasi ke BKN Regional - Uang Harian [8 org x 5 kali x 1 hari]	40.0 oh	420,000	16,800,000	RM
	> KOORDINASI KE PUSAT - Tiket [5 org x 5 kali] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [5 org x 5 kali x 2 hari]	25.0 ok	2,268,000	56,700,000	
	- Uang Harian [5 org x 5 kali x 3 hari] - Taksi Jogja [5 org x 5 keg x 2 kl] - Taksi Jakarta [5 org x 5 keg x 2 kl]	75.0 oh 50.0 ok 50.0 ok	530,000 198,000 256,000	39,750,000 9,900,000 12,800,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta) - Transport Lokal Koordinasi [10 org x 6 keg x 1 kota x 1 hari]	60.0 oh	170,000	10,200,000	RM
B	<u>Bina Mental Pegawai</u>			15,200,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.030-Yogyakarta) - Honor Instruktur Senam [1 org x 44 keg] - Honor Penceramah Agama [1 org x 4 keg]	44.0 ok 4.0 ok	300,000 500,000	13,200,000 2,000,000	RM
C	<u>Penanganan hukuman Disiplin Pegawai</u>			67,210,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta) - ATK - Bahan Komputer - Kudapan Rapat [10 org x 3 keg] - Konsumsi Makan Rapat [10 org x 3 keg]	3.0 pkt 1.0 pkt 30.0 ok 30.0 ok	500,000 1,500,000 15,000 50,000	1,500,000 1,500,000 450,000 1,500,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta) - Tiket Jakarta-Yogyakarta PP [5 org x 2 kali] - Uang Harian [5 org x 2 kali x 3 hari] - Biaya Penginapan [5 org x 2 kali x 2 hari] - Taksi Jakarta [5 org x 2 kali x 2 keg] - Taksi Jogja [5 org x 2 kali x 2 keg]	10.0 ok 30.0 oh 20.0 oh 20.0 ok 20.0 ok	2,268,000 530,000 730,000 256,000 198,000	22,680,000 15,900,000 14,600,000 5,120,000 3,960,000	RM
1558.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>			1,241,080,000	
1558.EBD.952	Lokasi : KOTA YOGYAKARTA <u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>	1.0 Dokumen		404,058,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Layanan Perencanaan			23,600,000	
A	<i>Penyusunan Krisna Renja Satker</i>			23,600,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			23,600,000	RM
	- ATK	2.0 pkt	2,000,000	4,000,000	
	- Bahan Komputer	2.0 pkt	1,500,000	3,000,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2.0 pkt	300,000	600,000	
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 4 kali x 2 hari]	400.0 ok	15,000	6,000,000	
	- Konsumsi Makan [50 org x 4 kali]	200.0 ok	50,000	10,000,000	
052	Layanan Penganggaran			160,500,000	
A	<i>Supervisi Pagu Indikatif dan Hasil RKA-K/L Pagu Anggaran dilingkungan Kantor wilayah</i>			48,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			23,600,000	RM
	- ATK	2.0 pkt	2,000,000	4,000,000	
	- Bahan Komputer	2.0 pkt	1,500,000	3,000,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2.0 pkt	300,000	600,000	
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 4 kali x 2 hari]	400.0 ok	15,000	6,000,000	
	- Konsumsi Makan [50 org x 4 kali]	200.0 ok	50,000	10,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			21,000,000	RM
	- Uang Harian [10 org x 1 kali x 5 hari]	50.0 oh	420,000	21,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			3,400,000	RM
	- Transpor Lokal [10 org x 1 kali x 2 hari]	20.0 oh	170,000	3,400,000	
B	<i>Penyusunan Rencana Penarikan Dana dan Kalender Kerja Pagu Alokasi Anggaran</i>			12,300,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			12,300,000	RM
	- ATK	1.0 pkt	2,000,000	2,000,000	
	- Bahan Komputer	1.0 pkt	1,500,000	1,500,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 pkt	300,000	300,000	
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 2 kali x 2 hari]	200.0 ok	15,000	3,000,000	
	- Konsumsi Makan [50 org x 2 kali]	100.0 ok	50,000	5,000,000	
	- Spanduk	1.0 pkt	500,000	500,000	
C	<i>Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah dan UPT</i>			65,750,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			13,550,000	RM
	- ATK	1.0 pkt	2,000,000	2,000,000	
	- Bahan Komputer	1.0 pkt	1,500,000	1,500,000	
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 3 kali]	150.0 ok	15,000	2,250,000	
	- Konsumsi Makan [50 org x 3 kali]	150.0 ok	50,000	7,500,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 pkt	300,000	300,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			41,400,000	RM
	- Ketua [1 org x 12 bln]	12.0 ob	400,000	4,800,000	
	- Wakil Ketua [1 org x 12 bln]	12.0 ob	350,000	4,200,000	
	- Sekretaris [1 org x 12 bln]	12.0 ob	300,000	3,600,000	
	- Anggota [8 org x 12 bln]	96.0 ob	300,000	28,800,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			10,800,000	RM
	- Narasumber Eksternal Eselon III [2 org x 2 jam x 3 keg]	12.0 oj	900,000	10,800,000	
D	<i>Analisa Kebutuhan Anggaran</i>			34,450,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			10,050,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 pkt	300,000	300,000	
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 3 kali]	150.0 ok	15,000	2,250,000	
	- Konsumsi Makan [50 org x 3 kali]	150.0 ok	50,000	7,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			21,000,000	RM
	- Uang Harian [10 org x 1 kali x 5 hari]	50.0 oh	420,000	21,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			3,400,000	RM
	- Transpor Lokal [10 org x 1 kali x 2 hari]	20.0 oh	170,000	3,400,000	
053	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran			219,958,000	
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>219,958,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			10,350,000	RM
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 3 kl]	150.0 ok	15,000	2,250,000	
	- Konsumsi Makan [50 org x 3 kl]	150.0 ok	50,000	7,500,000	
	- Penggandaan dan penjilidan Laporan	3.0 pkt	200,000	600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			209,608,000	RM
	- Tiket Jakarta-Yogya PP [7 org x 4 keg]	28.0 ok	2,268,000	63,504,000	
	- Biaya Penginapan Golongan III [7 org x 4 keg x 3 hari]	84.0 oh	730,000	61,320,000	
	- Uang Harian Jakarta [7 org x 4 keg x 4 hari]	112.0 oh	530,000	59,360,000	
	- Taksi Jogja [7 org x 4 keg x 2 kl]	56.0 ok	198,000	11,088,000	
	- Taksi Jakarta [7 org x 4 keg x 2 kl]	56.0 ok	256,000	14,336,000	
1558.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen		324,270,000	
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja			227,052,000	
A	<i>Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran TA 2024</i>			<i>149,600,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			1,600,000	RM
	- Penggandaan dan penjiilidan Laporan	8.0 pkt	200,000	1,600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			134,400,000	RM
	- Uang Harian [10 org x 8 kali x 4 hari]	320.0 oh	420,000	134,400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			13,600,000	RM
	- Transport Lokal [10 org x 8 kali]	80.0 ok	170,000	13,600,000	
B	<i>Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Kanwil</i>			<i>36,300,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			25,500,000	RM
	- ATK	2.0 pkt	1,000,000	2,000,000	
	- Penggandaan dan penjiilidan Laporan	2.0 pkt	500,000	1,000,000	
	- Bahan Komputer	2.0 pkt	1,500,000	3,000,000	
	- Konsumsi Kudapan [100 org x 3 kali]	300.0 ok	15,000	4,500,000	
	- Konsumsi Makan [100 org x 3 kali]	300.0 ok	50,000	15,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			10,800,000	RM
	- Narasumber Eksternal Eselon III [2 org x 2 jam x 3 keg]	12.0 oj	900,000	10,800,000	
C	<i>Penyusunan SAKIP Satuan Kerja</i>			<i>41,152,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			13,100,000	RM
	- ATK	2.0 pkt	1,000,000	2,000,000	
	- Penggandaan dan penjiilidan Laporan	2.0 pkt	300,000	600,000	
	- Spanduk	2.0 pkt	500,000	1,000,000	
	- Bahan Komputer	2.0 pkt	1,500,000	3,000,000	
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 2 kali]	100.0 ok	15,000	1,500,000	
	- Konsumsi Makan [50 org x 2 kali]	100.0 ok	50,000	5,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			12,452,000	RM
	- Tiket Jakarta-Yogya [2 org x 1 kali]	2.0 ok	2,268,000	4,536,000	
	- Biaya Penginapan golongan III [2 org x 1 kali x 2 hari]	4.0 oh	730,000	2,920,000	
	- Uang Harian [2 org x 1 kali x 3 hari]	6.0 oh	530,000	3,180,000	
	- Taksi Jogja [2 org x 1 keg x 2 kl]	4.0 ok	198,000	792,000	
	- Taksi Jakarta [2 org x 1 keg x 2 kl]	4.0 ok	256,000	1,024,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			15,600,000	RM
	- Transport Lokal [10 org x 4 kali]	40.0 ok	150,000	6,000,000	
	- Transport Peserta [32 org x 2 kgt]	64.0 ok	150,000	9,600,000	
052	Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan			7,800,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			7,800,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			7,800,000	RM
	- ATK	1.0 pkt	1,000,000	1,000,000	
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 2 kali]	100.0 ok	15,000	1,500,000	
	- Konsumsi Makan [50 org x 2 kali]	100.0 ok	50,000	5,000,000	
	- Penggandaan dan penjiilidan Laporan	1.0 pkt	300,000	300,000	
053	Penyusunan Manajemen Risiko			42,274,000	
A	Penyusunan Manajemen Risiko			42,274,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			9,850,000	RM
	- ATK	2.0 pkt	1,000,000	2,000,000	
	- Penggandaan dan penjiilidan Laporan	2.0 pkt	300,000	600,000	
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 3 kali x 1 hari]	150.0 ok	15,000	2,250,000	
	- Konsumsi Makan [50 org x 2 kali]	100.0 ok	50,000	5,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			22,824,000	RM
	- Tiket Jakarta-Yogya [2 org x 2 kali]	4.0 ok	2,268,000	9,072,000	
	- Biaya Penginapan golongan III [2 org x 2 kali x 2 hari]	8.0 oh	845,000	6,760,000	
	- Uang Harian [2 org x 2 kali x 2 hari]	8.0 oh	420,000	3,360,000	
	- Taksi Jogja [2 org x 2 keg x 2 kl]	8.0 ok	198,000	1,584,000	
	- Taksi Jakarta [2 org x 2 keg x 2 kl]	8.0 ok	256,000	2,048,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			9,600,000	RM
	- Transport Peserta [32 org x 2 kgt]	64.0 ok	150,000	9,600,000	
054	Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)			47,144,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			47,144,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			9,100,000	RM
	- ATK	2.0 pkt	1,000,000	2,000,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2.0 pkt	300,000	600,000	
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 2 kali]	100.0 ok	15,000	1,500,000	
	- Konsumsi makan [50 org x 2 kali]	100.0 ok	50,000	5,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			5,400,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon III BPKP [1 org x 3 jam x 2 keg]	6.0 oj	900,000	5,400,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			30,844,000	RM
	- Tiket Jakarta-Yogyakarta PP [2 org x 2 kali]	4.0 ok	2,268,000	9,072,000	
	- Uang Harian [2 org x 2 kali x 2 hari]	8.0 oh	420,000	3,360,000	
	- Uang Penginapan Golongan III [2 org x 2 kali x 1 hari]	4.0 oh	845,000	3,380,000	
	- Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 2 keg]	8.0 ok	256,000	2,048,000	
	- Taksi Jogja [2 org x 2 kali x 2 keg]	8.0 ok	198,000	1,584,000	
	- Transport Narasumber BPKP [2 org x 2 kgt x 1 hari]	4.0 oh	250,000	1,000,000	
	- Transport Peserta Luar Kota [26 org x 2 keg]	52.0 ok	200,000	10,400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			1,800,000	RM
	- Transport Peserta [6 org x 2 keg]	12.0 ok	150,000	1,800,000	
1558.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		285,102,000	
051	Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan			217,072,000	
A	<i>Penyusunan Laporan Keuangan</i>			<i>217,072,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			46,200,000	RM
	- ATK	2.0 pkt	1,000,000	2,000,000	
	- Bahan Komputer	2.0 pkt	1,500,000	3,000,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2.0 pkt	500,000	1,000,000	
	- Konsumsi Makan [65 org x 3 hari x 1 kali x 2 keg]	390.0 ok	50,000	19,500,000	
	- Konsumsi Kudapan [65 org x 3 hari x 2 kali x 2 keg]	780.0 ok	15,000	11,700,000	
	- Konsumsi Kudapan Pembukaan dan Penutupan Rekon [30 org x 2 kali x 2 kgt]	120.0 ok	15,000	1,800,000	
	- Konsumsi Makan Pembukaan dan Penutupan Rekon [30 org x 2 kali x 2 kgt]	120.0 ok	50,000	6,000,000	
	- Spanduk	2.0 pkt	600,000	1,200,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			10,800,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon III Kanwil DJPB, KPPN [3 org x 2 jam x 2 keg]	12.0 oj	900,000	10,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			101,592,000	RM	
	> REKON KE PUSAT			101,592,000		
	- Tiket PP [5 org x 2 kali]	10.0 ok	2,268,000	22,680,000		
	- Biaya Penginapan [5 org x 2 kali x 2 hari]	20.0 oh	730,000	14,600,000		
	- Uang Harian [5 org x 2 kali x 3 hari]	30.0 oh	530,000	15,900,000		
	- Taksi Jakarta [5 org x 2 kali x 2 keg]	20.0 ok	256,000	5,120,000		
	- Taksi Jogja [5 org x 2 kali x 2 keg]	20.0 ok	198,000	3,960,000		
	>> Koordinasi ke Pusat		0	12,452,000		
	- Tiket PP [2 org x 1 kali]	2.0 ok	2,268,000	4,536,000		
	- Biaya Penginapan [2 org x 1 kali x 2 hari]	4.0 oh	730,000	2,920,000		
	- Uang Harian [2 org x 1 kali x 3 hari]	6.0 oh	530,000	3,180,000		
	- Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 keg]	4.0 ok	256,000	1,024,000		
	- Taksi Jogja [2 org x 2 kali x 1 keg]	4.0 ok	198,000	792,000		
	>> Rekon Wilayah		0	26,880,000		
	- Uang Harian [8 org x 4 hari x 2 kali]	64.0 oh	420,000	26,880,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			58,480,000		RM
	- Transport Peserta Pra Rekon [44 org x 3 hari x 2 kgt]	264.0 ok	170,000	44,880,000		
	- Transport Lokal Koordinasi [8 org x 10 kali]	80.0 ok	170,000	13,600,000		
052	Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan			68,030,000		
A	<i>Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan</i>			45,128,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			14,250,000	RM	
	- ATK	3.0 pkt	1,000,000	3,000,000		
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	3.0 pkt	500,000	1,500,000		
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 3 kali]	150.0 ok	15,000	2,250,000		
	- Konsumsi Makan [50 org x 3 kali]	150.0 ok	50,000	7,500,000		
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			5,400,000	RM	
	- Honor Narasumber Eselon III Kanwil DJPB [1 org x 2 keg x 3 jam]	6.0 oj	900,000	5,400,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			18,678,000	RM	
	- Tiket Jakarta-Yogyakarta PP [3 org x 1 kali]	3.0 ok	2,268,000	6,804,000		
	- Uang Harian [3 org x 1 kali x 3 hari]	9.0 oh	530,000	4,770,000		
	- Biaya Penginapan [3 org x 1 kali x 2 hari]	6.0 oh	730,000	4,380,000		
	- Taksi Jakarta [3 org x 2 kali x 1 keg]	6.0 ok	256,000	1,536,000		
	- Taksi Jogja [3 org x 2 kali x 1 keg]	6.0 ok	198,000	1,188,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			6,800,000	RM
	- Transport Lokal Koordinasi [8 org x 5 kali]	40.0 ok	170,000	6,800,000	
<i>B</i>	<i>Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal</i>			<i>22,902,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			7,900,000	RM
	- ATK	2.0 pkt	500,000	1,000,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2.0 pkt	200,000	400,000	
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 2 kgt]	100.0 ok	15,000	1,500,000	
	- Konsumsi Makan [50 org x 2 kgt]	100.0 ok	50,000	5,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			12,452,000	RM
	- Tiket Jakarta-Yogyakarta PP [2 org x 1 kali]	2.0 ok	2,268,000	4,536,000	
	- Uang Harian [2 org x 1 kali x 3 hari]	6.0 oh	530,000	3,180,000	
	- Biaya Penginapan [2 org x 1 kali x 2 hari]	4.0 oh	730,000	2,920,000	
	- Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 keg]	4.0 ok	256,000	1,024,000	
	- Taksi Jogja [2 org x 2 kali x 1 keg]	4.0 ok	198,000	792,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			2,550,000	RM
	- Transport Lokal Koordinasi [5 org x 3 kali]	15.0 ok	170,000	2,550,000	
1558.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen		101,050,000	
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			20,100,000	
<i>A</i>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>20,100,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			20,100,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2.0 pkt	300,000	600,000	
	- Konsumsi Kudapan [50 org x 6 kali]	300.0 ok	15,000	4,500,000	
	- Konsumsi Makan [50 org x 6 kali]	300.0 ok	50,000	15,000,000	
052	Pembentukan Satker WBK/WBBM			47,830,000	
<i>A</i>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>47,830,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			10,400,000	RM
	- ATK	2.0 pkt	1,000,000	2,000,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2.0 pkt	300,000	600,000	
	- Konsumsi Kudapan [60 org x 2 kali]	120.0 ok	15,000	1,800,000	
	- Konsumsi Makan [60 org x 2 kali]	120.0 ok	50,000	6,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			37,430,000	RM
	- Tiket Jakarta-yogyakarta PP [5 org x 1 keg]	5.0 ok	2,268,000	11,340,000	
	- Biaya Penginapan Golongan III [5 org x 1 keg x 3 hari]	15.0 oh	730,000	10,950,000	
	- Uang Harian [5 org x 1 keg x 4 hari]	20.0 oh	530,000	10,600,000	
	- Taksi Jogja [5 org x 1 keg x 2 kl]	10.0 ok	198,000	1,980,000	
	- Taksi Jakarta [5 org x 1 keg x 2 kl]	10.0 ok	256,000	2,560,000	
053	Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi			18,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			18,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			7,800,000	RM
	- ATK	1.0 pkt	1,000,000	1,000,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 pkt	300,000	300,000	
	- Konsumsi Kudapan Peserta dan Panitia [50 org x 2 kali]	100.0 ok	15,000	1,500,000	
	- Konsumsi Makan Peserta dan Panitia [50 org x 2 kali]	100.0 ok	50,000	5,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			5,400,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon III Kejaksaan [2 org x 3 jam x 1 kgt]	6.0 oj	900,000	5,400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			4,800,000	RM
	- Transport Lokal [32 org x 1 kgt]	32.0 ok	150,000	4,800,000	
054	Pembangunan Budaya Anti Korupsi			15,120,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			15,120,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			4,920,000	RM
	- ATK	1.0 pkt	1,470,000	1,470,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 pkt	200,000	200,000	
	- Konsumsi Kudapan Peserta dan Panitia [50 org x 1 kali]	50.0 ok	15,000	750,000	
	- Konsumsi Makan Peserta dan Panitia [50 org x 1 kali]	50.0 ok	50,000	2,500,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			5,400,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon III Kejaksaan [2 org x 3 jam x 1 kgt]	6.0 oj	900,000	5,400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			4,800,000	RM
	- Transport Lokal [32 org x 1 kgt]	32.0 ok	150,000	4,800,000	
1558.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Dokumen		126,600,000	
051	Pengelolaan Kearsipan			15,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			15,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA (409181) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 23,487,706,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			15,000,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	4.0 pkt	500,000	2,000,000	
	- Kudapan Rapat [50 org x 4 kali]	200.0 ok	15,000	3,000,000	
	- Konsumsi Makan Rapat [50 org x 4 kali]	200.0 ok	50,000	10,000,000	
052	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan			111,600,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			111,600,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			600,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	3.0 pkt	200,000	600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			111,000,000	RM
	- Uang Harian Arsiparis [10 org x 6 keg x 4 hari]	240.0 oh	420,000	100,800,000	
	- Uang Harian Lokal Koordinasi Arsiparis [10 org x 6 keg x 1 kota x 1 hari]	60.0 oh	170,000	10,200,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

YOGYAKARTA, 11 Januari 2024



AGUNG REKTONO SETO
 NIP. 197012021999031001

REKAP MATRIKS RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (DISBURSEMENT PLAN)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

NO	PADU	TAHUN ANGGARAN 2024																																																							
		TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV																			
		JAN				FEB				MAR				APR				MEI				JUN				JUL				AGUS				SEP				OKT				NOV				DES											
BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM														
1	KAWIL KEMENDUKHUM DIY (SETJAU)	23.487.704																																																							
2	KAWIL KEMENDUKHUM DIY (LAHU)	2.439.601																																																							
3	KAWIL KEMENDUKHUM DIY (PAD)	901.289																																																							
4	KAWIL KEMENDUKHUM DIY (MGRAS)	1.597.819																																																							
5	KAWIL KEMENDUKHUM DIY (G)	2.871.760																																																							
6	KAWIL KEMENDUKHUM DIY (PP)	520.020																																																							
7	KAWIL KEMENDUKHUM DIY (HAK)	239.390																																																							
8	KAWIL KEMENDUKHUM DIY (SPP)	2.616.273																																																							
9	KAWIL KEMENDUKHUM DIY (LTSRANG)	275.351																																																							
	JUMLAH	34.949.734	1.106.875	295.060	170.130	1.106.875	295.060	125.789	-	1.106.875	440.388	260.708	-	2.197.181	1.235.910	257.740	535.000	-	1.106.875	306.010	143.299	-	2.197.181	429.438	389.845	-	1.106.875	306.010	381.975	-	1.106.875	295.060	225.806	-	1.106.875	440.388	139.349	-	1.106.875	295.060	141.725	-	1.106.875	306.010	74.874	-	1.106.880	429.468	104.488	-							
1.	PENARIKAN ANGGARAN PER BULAN		1.572.074			2.335.488					2.056.110				5.875.822		2.964.236					4.219.550		3.319.070				2.465.982				2.913.948				2.312.105				2.919.226				1.924.982													
2.	% PENARIKAN ANGGARAN PER BULAN		4%			7,25%					6,17%				18,24%		8,46%					12,87%		3,47%				7,51%				8,34%				6,62%				3,78%				5,51%													
3.	TOTAL KUMULATIF PENARIKAN ANGGARAN PER BULAN		1.572.074			4.107.562				6.163.672				12.833.294		15.603.538		18.833.082				23.133.151		26.893.081				31.065.166				34.023.722				37.023.722				40.023.722				43.948.704													
4.	% KUMULATIF PENARIKAN ANGGARAN PER BULAN		4,50%			11,75%				19,52%				35,16%		44,65%		58,72%				65,19%		73,76%				82,10%					88,71%				93,07%				96,79%				100,00%												
5.	% PENARIKAN ANGGARAN PER TRIWULAN																																																								
6.	% KUMULATIF PENARIKAN ANGGARAN PER TRIWULAN																																																								
7.	PENARIKAN BELANJA PEKERJA PER TRIWULAN (PP)																																																								
8.	% PENARIKAN BELANJA PEKERJA PER TRIWULAN (PP)																																																								
9.	PENARIKAN BELANJA BARANG OPERASIONAL PER TRIWULAN (BO)																																																								
10.	% PENARIKAN BELANJA BARANG OPERASIONAL PER TRIWULAN (BO)																																																								
11.	PENARIKAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PER TRIWULAN (BN)																																																								
12.	% PENARIKAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PER TRIWULAN (BN)																																																								
13.	PENARIKAN BELANJA MODAL PER TRIWULAN (BM)																																																								
14.	% PENARIKAN BELANJA MODAL PER TRIWULAN (BM)																																																								

Legenda:

BP : Belanja Pegawai
BO : Belanja Barang Operasional
BN : Belanja Barang Non Operasional
BM : Belanja Modal

1. PENARIKAN ANGGARAN PER BULAN : Jumlah penarikan anggaran per bulannya
2. % PENARIKAN ANGGARAN PER BULAN : Jumlah penarikan anggaran per bulannya dibagi dengan total pagu x 100%
3. TOTAL KUMULATIF PENARIKAN ANGGARAN PER BULAN : Penjumlahan kumulatif penarikan anggaran per bulannya untuk semua bulan (BO, BN dan BM)
4. % KUMULATIF PENARIKAN ANGGARAN PER BULAN : Penjumlahan kumulatif penarikan anggaran per bulannya untuk semua bulan (BO, BN dan BM) dibagi total pagu x 100%
5. % PENARIKAN ANGGARAN PER TRIWULAN : Penjumlahan penarikan anggaran seluruh bulannya per triwulan dibagi total pagu x 100%
6. % KUMULATIF PENARIKAN ANGGARAN PER TRIWULAN : Penjumlahan kumulatif penarikan anggaran seluruh bulannya per triwulan dibagi total pagu x 100%
7. PENARIKAN BELANJA PEKERJA PER TRIWULAN (PP) : Penjumlahan Penarikan Anggaran Belanja Pegawai per triwulan
8. % PENARIKAN BELANJA PEKERJA PER TRIWULAN (PP) : Penjumlahan Penarikan Anggaran Belanja Pegawai per triwulan dibagi Total Pagu Belanja Pegawai x 100%
9. PENARIKAN BELANJA BARANG OPERASIONAL PER TRIWULAN (BO) : Penjumlahan Penarikan Anggaran Belanja Barang Operasional per triwulan
10. % PENARIKAN BELANJA BARANG OPERASIONAL PER TRIWULAN (BO) : Penjumlahan Penarikan Anggaran Belanja Barang Operasional per triwulan dibagi Total Pagu Belanja Barang Operasional x 100%
11. PENARIKAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PER TRIWULAN (BN) : Penjumlahan Penarikan Anggaran Belanja Barang Non Operasional per triwulan
12. % PENARIKAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PER TRIWULAN (BN) : Penjumlahan Penarikan Anggaran Belanja Barang Non Operasional per triwulan dibagi Total Pagu Belanja Barang Non Operasional x 100%
13. PENARIKAN BELANJA MODAL PER TRIWULAN (BM) : Penjumlahan Penarikan Anggaran Belanja Modal per triwulan
14. % PENARIKAN BELANJA MODAL PER TRIWULAN (BM) : Penjumlahan Penarikan Anggaran Belanja Modal per triwulan dibagi Total Pagu Belanja Modal x 100%

MATRIKS RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (DISBURSEMENT PLAN)
TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM :Penegakan dan pelayanan Hukum
SATKER :KANWIL DIY (AHU)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN	PAGU	TAHUN ANGGARAN 2024																																																											
			TRIMULAN I												TRIMULAN II												TRIMULAN III						TRIMULAN IV																													
			JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGUS			SEP			OKT			NOV			DES																										
BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM																			
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	243961	0	0	0	0	0	352470	0	0	0	0	98275	0	0	0	0	514808	0	0	0	0	189770	0	0	0	0	109155	0	0	0	0	343946	0	0	0	0	138425	0	0	0	0	202072	0	0	0	0	192048	0	0	0	0	210232	0	0	0	0	88500	0	0	0	0
5251	Penyenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	243961	0	0	0	0	0	352470	0	0	0	0	98275	0	0	0	0	514808	0	0	0	0	189770	0	0	0	0	109155	0	0	0	0	343946	0	0	0	0	138425	0	0	0	0	202072	0	0	0	0	192048	0	0	0	0	210232	0	0	0	0	88500	0	0	0	0
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1272000	0	0	0	0	0	197987	0	0	0	0	9420	0	0	0	0	357627	0	0	0	0	94820	0	0	0	0	55115	0	0	0	0	187715	0	0	0	0	65910	0	0	0	0	118607	0	0	0	0	25647	0	0	0	0	153962	0	0	0	0	4200	0	0	0	0
5251.BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1272000	0	0	0	0	0	197987	0	0	0	0	9420	0	0	0	0	357627	0	0	0	0	94820	0	0	0	0	55115	0	0	0	0	187715	0	0	0	0	65910	0	0	0	0	118607	0	0	0	0	25647	0	0	0	0	153962	0	0	0	0	4200	0	0	0	0
051	Layanan Kewarganegaraan	28632	0	0	0	0	0	3870	0	0	0	0	4620	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan	8660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	Layanan Kewarganegaraan	19972	0	0	0	0	0	3870	0	0	0	0	4620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4487	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
062	Pejabat PPNS	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A	Pejabat PPNS	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
053	Pejabat Notaris	20850	0	0	0	0	0	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Pejabat Notaris	20850	0	0	0	0	0	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
054	Layanan AHU Lainnya	74690	0	0	0	0	0	11200	0	0	0	0	4800	0	0	0	0	11200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11800	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	14900	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0
A	Layanan AHU Lainnya	74690	0	0	0	0	0	11200	0	0	0	0	4800	0	0	0	0	11200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11800	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	14900	0	0	0	0	4200	0	0	0	0					
055	Migrasi Data Layanan AHU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A	Migrasi Data Layanan AHU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
056	Sosialisasi Destinasi/FGD/Rakor/Seminar/ Webinar/ Workshop/ Pendalaman Materi Layanan AHU di Wilayah	691790	0	0	0	0	0	93860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228020	0	0	0	0	89020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166270	0	0	0	0	68510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Sosialisasi Destinasi/FGD/Rakor/Seminar/ Webinar/ Workshop/ Pendalaman Materi Layanan AHU di Wilayah	167720	0	0	0	0	0	93860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B	Sosialisasi Destinasi/FGD/Rakor/Seminar/ Webinar/ Workshop/ Pendalaman Materi Layanan AHU di Wilayah	151300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
C	Sosialisasi Destinasi/FGD/Rakor/Seminar/ Webinar/ Workshop/ Pendalaman Materi Layanan AHU di Wilayah	181240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D	Sosialisasi Destinasi/FGD/Rakor/Seminar/ Webinar/ Workshop/ Pendalaman Materi Layanan AHU di Wilayah	175530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
057	Publikasi, Pameran dan Help Desk	102690	0	0	0	0	0	23165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Publikasi Layanan AHU	92600	0	0	0	0	0	23165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Help Desk Layanan AHU	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
058	Koordinasi	252168	0	0	0	0	0	63042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Tanpa sub Komponen	252168	0	0	0	0	0	63042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	8495	0	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	1955	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5251.BCB.001	Penanganan Perkara Pada Kantor Wilayah	8495	0	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	1955	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
051	Advokasi	8495	0	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	1955	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A	Advokasi	8495	0	0	0																																																									

MATRIKS RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (DISBURSEMENT PLAN)
TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN
SATKER : KANWIL DIY (SEKJEN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN	PAGU	TAHUN ANGGARAN 2024																																																
			TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV												
			JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGUS			SEP			OKT			NOV			DES															
BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM				
013.WA	Program Dukungan Manajemen	2348776	1106875	295060	170138	0	1106875	295060	125789	0	1106875	440386	260708	0	2197181	1235910	257740	0	535000	1106875	306010	143299	0	2197181	429436	389845	0	1106875	306010	351975	0	1106875	295060	228006	0	1106875	440386	139349	0	1106875	295060	141725	0	1106875	306010	74874	0	1106880	429466	104468	0
158	Pengelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	2348776	1106875	295060	170138	0	1106875	295060	125789	0	1106875	440386	260708	0	2197181	1235910	257740	0	535000	1106875	306010	143299	0	2197181	429436	389845	0	1106875	306010	351975	0	1106875	295060	228006	0	1106875	440386	139349	0	1106875	295060	141725	0	1106875	306010	74874	0	1106880	429466	104468	0
158.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2195716	1106875	295060	49204	0	1106875	295060	37854	0	1106875	440386	98334	0	2197181	1235910	50916	0	1106875	306010	46395	0	2197181	429436	62901	0	1106875	306010	59394	0	1106875	295060	31199	0	1106875	440386	47864	0	1106875	295060	31199	0	1106875	306010	39609	0	1106880	429466	21703	0	
158.EBA.958	Layanan BNN	96760	0	0	24800	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	2040	0	0	0	24125	0	0	0	2040	0	0	0	680	0	0	0	2040	0	0	0	680	0	0	0	
051	Pembiayaan dan Pengelolaan BNN	53680	0	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1360	0	0	0	23440	0	0	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	1360	0	0	0					
A	Penatausahaan BNN	53680	0	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1360	0	0	0	23440	0	0	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	1360	0	0	0					
052	Monitoring dan Pelaporan BNN	43080	0	0	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	680	0	0	0	680	0	0	0	680	0	0	0	680	0	0	0					
A	Tanpa Sub Komponen	43080	0	0	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	680	0	0	0	680	0	0	0	680	0	0	0									
053	Pangamanan BNN Satuan Kerja Wilayah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
A	Tanpa Sub Komponen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
158.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	245604	0	0	17554	0	0	0	19179	0	0	0	18354	0	0	0	30631	0	0	0	17554	0	0	0	19179	0	0	0	17554	0	0	0	19179	0	0	0	30506	0	0	0	19179	0	0	0	17554	0					
051	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik	149720	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0									
A	Penyediaan Informasi Publik	149720	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0	0	0	12479	0									
052	Pelaksanaan Kebutuhan	98854	0	0	5075	0	0	0	6700	0	0	0	5875	0	0	0	18152	0	0	0	5075	0	0	0	6700	0	0	0	5075	0	0	0	6700	0	0	0	18027	0	0	0	6700	0									
A	Tanpa Sub Komponen	98854	0	0	5075	0	0	0	6700	0	0	0	5875	0	0	0	18152	0	0	0	5075	0	0	0	6700	0	0	0	5075	0	0	0	6700	0	0	0	18027	0	0	0	6700	0									
158.EBA.959	Layanan Protokol	81702	0	0	860	0	0	0	1850	0	0	0	11710	0	0	0	2150	0	0	0	11710	0	0	0	14602	0	0	0	11710	0	0	0	1850	0	0	0	14602	0	0	0	11710	0									
051	Koordinasi Keprotokoliran	8800	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	850	0	0	0	850	0	0	0	850	0	0	0	1150	0	0	0	850	0	0	0	850	0	0	0	850	0													
052	Pelaksanaan Keprotokoliran	72902	0	0	860	0	0	0	1000	0	0	0	10860	0	0	0	1300	0	0	0	11710	0	0	0	13452	0	0	0	11710	0	0	0	1000	0	0	0	10860	0													
158.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3950	0	0	0	4450	0	0	0	0	0	0	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
051	Fasilitas Ketatausahaan	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
051	Fasilitas Kelembagaan	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
158.EBA.962	Layanan Umum	132239	0	0	6000	0	0	0	10105	0	0	0	26000	0	0	0	12105	0	0	0	16452	0	0	0	23130	0	0	0	5000	0	0	0	8130	0	0	0	5000	0	0	0	8130	0									
051	Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barang/UPBJ	97329	0	0	6000	0	0	0	10105	0	0	0	6000	0	0	0	12105	0	0	0	16452	0	0	0	8130	0	0	0	5000	0	0	0	8130	0	0	0	5000	0													
A	Tanpa Sub Komponen	97329	0	0	6000	0	0	0	10105	0	0	0	6000	0	0	0	12105	0	0	0	16452	0	0	0	8130	0	0	0	5000	0	0	0	8130	0	0	0	5000	0													
052	Pengelolaan Perpustakaan	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
A	Tanpa Sub Komponen	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
053	Pengelolaan Kesehatan Pegawai	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
A	Tanpa Sub Komponen	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
158.EBA.964	Layanan Perkantoran	2053671	1106875	295060	0	1106875	295060	0	1106875	440386	0	2197181	1235910	0	1106875	306010	0	2197181	429436	0	1106875	306010	0	1106875	295060	0	1106875	440386	0	1106875	295060	0	1106875	306010	0	1106880	429466	0													
001	Gaji dan Tunjangan	1546317	1106875	0	0	1106875	0	0	1106875	0	0	2197181	0	0	1106875	0	0	2197181	0	0	1106875	0	0	1106875	0	0	1106875	0	0	1106875	0	0	1106875	0	0	1106880	0	0													
A	Benefit Gaji dan Tunjangan	1526412	1090300	0	0	1090300	0	0	1090300	0	0	218606	0	0	1090300	0	0	218606	0	0	1090300	0	0	1090300	0	0	1090300	0	0	1090300	0	0	1090300	0	0	1090300	0	0													
B	Uang Lembur	199805	16575	0	0	16575	0	0	16575	0	0	16575	0	0	16575	0	0	16575	0	0	16575	0	0	16575	0	0	16575	0	0	16575	0	0	16575	0	0	16580	0	0													
052	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	5073854	0	295060	0	0	295060	0	0	440386	0	0	1235910	0	0	306010	0	0	429436	0	0	306010	0	0	295060	0	0	440386	0	0	295060	0	0	306010	0	0															
A	Pakaian Dinas (Pakaian)	19050	0	0	0	0	0	0	0	19050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
B	Pemeliharaan Gedung	537508	0	0	0	0	0	0	0	134376	0	0	0	0	0	0	0	0	134376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134378	0															
C	Pemeliharaan Perlatan Perkantoran	211138	0	0	17594	0	17594	0	0	17594	0	0	17594	0	0	17594	0	0	175																																

MATRIKS RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (DISBURSEMENT PLAN)
TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
SATKER : KANWIL DIY (KEKAYAAN INTELEKTUAL)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN	PAGU	TAHUN ANGGARAN 2024																																																			
			TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV															
			JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGUS			SEP			OKT			NOV			DES																		
BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM							
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2871760	0	0	0	0	0	0	297688	0	0	0	242693	0	0	0	297854	0	0	0	486072	0	0	0	374916	0	0	0	424748	0	0	0	280390	0	0	0	248671	0	0	0	106532	0	0	0	63162	0	0	0	60034	0				
5253	Penyenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	2871760	0	0	0	0	0	0	297688	0	0	0	242693	0	0	0	297854	0	0	0	486072	0	0	0	374916	0	0	0	424748	0	0	0	280390	0	0	0	248671	0	0	0	106532	0	0	0	63162	0	0	0	60034	0				
5253.BDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	2716201	0	0	0	0	0	0	292751	0	0	0	240223	0	0	0	295384	0	0	0	486072	0	0	0	277687	0	0	0	422278	0	0	0	289512	0	0	0	287546	0	0	0	106532	0	0	0	63162	0	0	0	60034	0				
5253.BDC.001	Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	1633882	0	0	0	0	0	0	172871	0	0	0	3530	0	0	0	221485	0	0	0	236792	0	0	0	156115	0	0	0	390095	0	0	0	227674	0	0	0	176908	0	0	0	492555	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
051	Penetapan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah	10650	0	0	0	0	0	0	4260	0	0	0	2130	0	0	0	2130	0	0	0	2130	0	0	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A	Tanpa Sub Komponen	10650	0	0	0	0	0	0	4260	0	0	0	2130	0	0	0	2130	0	0	0	2130	0	0	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
052	Pelaksanaan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1619157	0	0	0	0	0	0	166742	0	0	0	1400	0	0	0	217541	0	0	0	234052	0	0	0	150300	0	0	0	389055	0	0	0	226949	0	0	0	176908	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A	Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis	562341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	149162	0	0	0	8902	0	0	0	8902	0	0	0	322567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal	201864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C	Workshop/Diseminasi/Seminar Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya	485099	0	0	0	0	0	0	81442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D	Pelaksanaan Agenda RUKI (Guru Kekayaan Intelektual)	279583	0	0	0	0	0	0	83300	0	0	0	0	0	0	0	105253	0	0	0	83300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	Penyarklasan Informasi Kekayaan Intelektual	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
053	Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah	8075	0	0	0	0	0	0	1815	0	0	0	0	0	0	0	1815	0	0	0	0	0	0	0	1815	0	0	0	240	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Tanpa Sub Komponen	8075	0	0	0	0	0	0	1815	0	0	0	0	0	0	0	1815	0	0	0	0	0	0	0	1815	0	0	0	240	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5253.BDC.002	Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	303453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176726	0	0	0	0	0	0	0	175382	0	0	0	0	0	0	0	1345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
051	Penetapan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	2699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	Tanpa Sub Komponen	2699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
052	Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	300764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175382	0	0	0	0	0	0	0	175382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Edukasi/Himbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran HKI dengan Instansi Terkait	300764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175382	0	0	0	0	0	0	0	175382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5253.BDC.003	Fasilitas Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	722866	0	0	0	0	0	0	119034	0	0	0	59967	0	0	0	73898	0	0	0	73898	0	0	0	119492	0	0	0	30838	0	0	0	30838	0	0	0	30838	0	0	0	59967	0	0	0	63162	0	0	0	60034	0	0			
051	Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	719671	0	0	0	0	0	0	119994	0	0	0	59967	0	0	0	73898	0	0	0	73898	0	0	0	119492	0	0	0	30838	0	0	0	30838	0	0	0	30838	0	0	0	59967	0	0	0	63162	0	0	0	60034	0	0	0	0	0
A	Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual	167181	0	0	0	0	0	0	27862	0	0	0	13931	0	0	0	27862	0	0	0	27862	0	0	0	13931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual	158180	0	0	0	0	0	0	22095	0	0	0	11348	0	0	0	11348	0	0	0	11348	0	0	0	11348	0	0	0	11348	0	0	0	11348	0	0	0	11348	0	0	0	11348	0	0	0	11348	0	0	0	11348	0	0	0	11352	0
C	Koordinasi dengan Instansi Terkait	233912	0	0	0	0	0	0	36980	0	0	0	19490	0	0	0	19490	0	0	0	19490	0	0	0	19490	0	0	0	19490	0	0	0	19490	0	0	0	19490	0	0	0	19490	0	0	0	19490	0	0	0	19522	0	0	0	0	0
D	Mobile IP Clinic di Wilayah	182398	0	0	0	0	0	0	30396	0	0	0	15198	0	0	0	15198	0	0	0	15198	0	0	0	60792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
052	Evaluasi dan Pelaporan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	Tanpa Sub Komponen	3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5253.BKB	Pemantauan Produk	161659	0	0	0	0	0	0	4937	0	0	0	2470	0	0	0	2470	0	0	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5253.BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	161659	0	0	0	0	0	0	4937	0	0	0	2470	0	0	0	2470	0	0	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051	Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah	122004	0	0	0	0	0	0	4937	0	0	0	2470	0	0	0	2470	0	0	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Kelengkapan Pemantauan/Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait	97300	0	0	0	0	0	0	3937	0	0	0	1970	0	0	0	1970	0	0	0	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Pemantauan/Pengawasan Kekayaan Intelektual Lainnya	24695	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	19696	0	0	0	500</																									

MATRIKS RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (DISBURSEMENT PLAN)
TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM : Pembentukan Regulasi
SATKER : KANWIL DIY (PP)

KODE	KEGIATAN	PAGU	TAHUN ANGGARAN 2024																											
			TRIWULAN I						TRIWULAN II						TRIWULAN III						TRIWULAN IV									
			JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUS		SEP		OKT		NOV		DES					
BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM			
ABD.001	Rekomendasi Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah	422,365																												
051	Persiapan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah	131																												
A	Tanpa Sub Komponen	131						131																						
052	Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	370,125																												
B	Pelaksanaan Harmonisasi	370,125						30,986																						
053	Pelaksanaan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah	51,734																												
B	Kajian Peraturan Daerah	22,725																												
C	Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	225																												
D	Perencanaan Kegiatan Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan di Daerah	28,784																												
054	Pelaporan Harmonisasi dan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah	375																												
A	Persiapan	375																												
ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan di Daerah	97,635																												
051	Persiapan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan	115																												
A	Persiapan	115																												
052	Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan	96,795																												
A	Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang undangan di Daerah	300																												
B	Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah	10,750																												
C	Pola karir Perancang Peraturan Perundang undangan di Daerah	2,500																												
D	Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah	66,120																												
F	Penilaian Indeks Reformasi Hukum	17,125																												
053	Pelaporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan	725																												
A	Tanpa Sub Komponen	725																												
	JUMLAH	520,000																												
	TOTAL KUMULATIF	520,000																												
	TOTAL KUMULATIF BELANJA PEGAWAI	0																												
	TOTAL KUMULATIF BELANJA BARANG OPERASIONAL	0																												
	TOTAL KUMULATIF BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	520,000																												
	TOTAL KUMULATIF BELANJA MODAL	0																												

Keterangan :
 * BP - Belanja Pegawai
 * BBO - Belanja Barang Operasional
 * BBN - Belanja Barang Non Operasional
 * BM - Belanja Modal
 * Total Kumulatif = Penjumlahan dari (BP+BM+BP) Per Tiga Bulan
 * Total Kumulatif Belanja Pegawai = jumlah belanja pegawai per triwulan
 * Total Kumulatif Belanja Barang Operasional = jumlah belanja barang operasional per triwulan
 * Total Kumulatif Belanja Barang Non Operasional = jumlah belanja barang non operasional per triwulan
 * Total Kumulatif Belanja Modal = jumlah belanja modal per triwulan

MATRIKS RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (DISBURSEMENT PLAN)
TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM : PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM
SATKER : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.J YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN	PAGU	TAHUN ANGGARAN 2024																																																	
			TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III						TRIWULAN IV																			
			JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL		AGUS		SEP		OKT		NOV		DES																					
			BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM										
013.09.BG	Program Pemanjauan dan Penegakan HAM	23895	0	0	0	0	0	0	15260	0	0	0	21740	0	0	0	33780	0	0	0	23700	0	0	0	29560	0	0	0	30591	0	0	0	24840	0	0	0	27082	0	0	0	12250	0	0	0	0	0	0	0	0	21082	0	
5255	Penyelenggaraan Pemanjauan HAM di Wilayah	23895	0	0	0	0	0	15260	0	0	0	21740	0	0	0	33780	0	0	0	23700	0	0	0	29560	0	0	0	30591	0	0	0	24840	0	0	0	27082	0	0	0	12250	0	0	0	0	0	0	0	0	21082	0		
5255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	62400	0	0	0	0	0	1340	0	0	0	1600	0	0	0	9100	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	9340	0	0	0	14290	0	0	0	6000	0	0	0	8330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5255.BAH.001	Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	62400	0	0	0	0	0	1340	0	0	0	1600	0	0	0	9100	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	9340	0	0	0	14290	0	0	0	6000	0	0	0	8330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
001	Identifikasi Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	1980	0	0	0	0	0	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A	Tanpa Sub Komponen	1980					1340																																													
002	Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	46350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	0	0	0	9100	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	9100	0	0	0	14050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	Tanpa Sub Komponen	19800									1600				9100																																					
B	Tanpa Sub Komponen	26550																	12500																																	
003	Penyusunan Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A	Tanpa Sub Komponen	1980																																																		
004	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A	Tanpa Sub Komponen	11250																																																		
B	Tanpa Sub Komponen	1240																																																		
5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	28200	0	0	0	0	0	640	0	0	0	8350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5255.BDB.001	Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	20200	0	0	0	0	0	640	0	0	0	8350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	Periapan Aksi Strategi Nasional Bisnis dan HAM	640	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Tanpa Sub Komponen	640					640																																													
002	Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah	8350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Tanpa Sub Komponen	8350									8350																																									
003	Pemantauan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah	10460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	Tanpa Sub Komponen	10460																																																		
004	Pelaporan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	Tanpa Sub Komponen	750																																																		
5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	83215	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5255.FBA.001	Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah	83215	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Periapan Aksi HAM di Wilayah	8160	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Tanpa Sub Komponen	8160					730																																													
002	Pelaksanaan Aksi HAM di Wilayah	74525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Tanpa Sub Komponen	32361																																																		
B	Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat	42164																																																		
003	Evaluasi dan Pelaporan Aksi HAM di Wilayah	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Tanpa Sub Komponen	530																																																		
5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	19160	0	0	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	0	8010	0	0	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5255.FBA.002	Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	19160	0	0	0	0	0	350	0	0	0	400	0	0	0	6050	0	0	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	Periapan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Tanpa Sub Komponen	350					350																																													
002	Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	17650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	6050	0	0	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Tanpa Sub Komponen	17650									400				6050																																					
003	Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan																																																			

MATRIKS RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (DISBURSEMENT PLAN)
TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM : Dukungan Manajemen
SATKER : KANWIL DIY (BSK)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN	PAGU	TAHUN ANGGARAN 2024																																				
			TRIWULAN I							TRIWULAN II							TRIWULAN III							TRIWULAN IV															
			JAN		FEB		MAR			APR		MEI			JUN		JUL			AGUS		SEP			OKT		NOV			DES									
BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM	BP	BO	BN	BM				
013.WA	Program Dukungan Manajemen	275361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6246	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	275361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6249.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	275361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6249.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	211752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
091	Analisa Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	42300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	Evaluasi Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	42300																																					
092	Analisis Kebijakan dengan pemanfaatan (BPKUNHAM)	92672																																					
A	Tanpa Sub Komponen	92672																																					
093	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-ISM	76780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-ISM	60980																																					
B	Pendampingan Penelitian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	15800																																					
6249.ABD.002	Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	63609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	63609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	11020																																					
B	Penerbitan Jurnal	52589																																					
JUMLAH			275361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL KUMULATIF				58199							139469							220274							275361														
TOTAL KUMULATIF BELANJA PEGAWAI (BP)			0	0							0							0							0														
TOTAL KUMULATIF BELANJA BARANG OPERASIONAL (BO)			0	0							0							0							0														
TOTAL KUMULATIF BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (BN)			27381	58199							139469							220274							275361														
TOTAL KUMULATIF BELANJA MODAL (BM)			0	0							0							0							0														

- Keterangan :
- BP : Belanja Pegawai
 - BO : Belanja Barang Operasional
 - BN : Belanja Barang Non Operasional
 - BM : Belanja Modal
 - Total Kumulatif = Penjumlahan dari (BP+BM+BP) Per Tiga Bulan
 - Total Kumulatif Belanja Pegawai = jumlah belanja pegawai per triwulan
 - Total Kumulatif Belanja Barang Operasional = jumlah belanja barang operasional per triwulan
 - Total Kumulatif Belanja Barang Non Operasional = jumlah belanja barang non operasional per triwulan
 - Total Kumulatif Belanja Modal = jumlah belanja modal per triwulan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Topan Sopuan

Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
D.I Yogyakarta

TOPAN SOPUAN
NIP. 197412252003121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 23.487.706.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 23.487.706.000,-

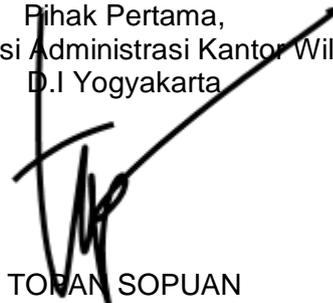
Yogyakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
D.I Yogyakarta



TORAN SOPUAN
NIP. 197412252003121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Topan Sopuan

Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
D.I Yogyakarta


TOPAN SOPUAN
NIP. 197412252003121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yani Firdaus
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
D.I Yogyakarta

MUHAMMAD YANI FIRDAUS
NIP. 196510011985031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.597.819.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.597.819.000,-

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
D.I Yogyakarta



MUHAMMAD YANI FIRDAUS
NIP. 196510011985031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yani Firdaus

Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
D.I Yogyakarta

MUHAMMAD YANI FIRDAUS
NIP. 196510011985031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Ari Wibawa
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

AGUNG ARIBAWA
NIP. 198305292001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	83 Indeks
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85 %
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95 %
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98 %
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90 %
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100 %
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100 %
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75 %
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90 %
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19 %
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	100 %
6.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90 %
7.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70 %
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85 %
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100 %
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100 %
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100 %
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	0 UPT
		2. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	0 UPT
		3. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)	0 UPT
		4. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	0 UPT
		5. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)	0 UPT
		6. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	0 UPT

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 901.269.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 901.269.000,-

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasarakatan
Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



AGUNG ARIBAWA
NIP. 198305292001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Aribawa

Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

AGUNG ARIBAWA
NIP. 198305292001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Monica Dhamayanti
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
D.I Yogyakarta

MONICA DHAMAYANTI
NIP. 196901251997032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5 %
2.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88 %
3.	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	1. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17 %
5.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80 %
6.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang
7.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah
8.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
9.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan
		2. Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25 %
11.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 %
		2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80 %
12.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 %
13.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 7.778.844.000 ,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.439.601.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.871.760.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2.467.483.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 668.890.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 520.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 148.890.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 239.895.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 239.895.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 275.361.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 275.361.000,-

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
D.I Yogyakarta



MONICA DHAMAYANTI
NIP. 196901251997032002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Monica Dhamayanti

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
D.I Yogyakarta


MONICA DHAMAYANTI
NIP. 196901251997032002